

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat kemiskinan merupakan tantangan yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia menciptakan beberapa program untuk menuntaskan kemiskinan. Kemiskinan ialah suatu persoalan yang sangat diperhatikan khusus oleh pemerintahan. Kemiskinan identik dengan keadaan yang berkaitan dengan kesulitan dan kekurangan dalam mencukupi kebutuhan hidup seseorang. Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, dan tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini yang harus diperbaiki sehingga dengan itu tingkat kemiskinan akan mengikuti (World Bank, 2021).

Sampai saat ini kemiskinan masih menjadi fokus utama pembangunan suatu perekonomian dalam negara berkembang yang harus diselesaikan oleh negara itu sendiri. Hal ini dibuktikan masih besarnya persentase jumlah penduduk miskin. Kemiskinan dapat diartikan dimana seseorang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikarenakan berbagai penyebab salah satunya pendapatan yang rendah. Persoalan kemiskinan juga dapat dipicu karena masih tingginya ketimpangan, upah minimum yang tidak sesuai dengan biaya hidup, masih banyaknya pengangguran dan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahun nya.

Kemiskinan menjadi suatu permasalahan di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 10,83% menurun 0.21% dari tahun sebelumnya pada 2023 yaitu 11,04%.

Namun, tingkat kemiskinan Indonesia belum mengalami penurunan yang signifikan, meskipun ada penurunan dalam data statistik BPS, secara kualitatif belum ada dampak perubahan yang nyata. Salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia adalah kesenjangan antara daerah dan kelompok sosial yang disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata. Hal ini mengarah pada kesenjangan yang lebih besar antara masyarakat setempat, kelompok sosial, orang miskin dan penduduk kaya. Masalah kemiskinan ini tidak mudah diatasi, tetapi ini bukan tugas yang sulit untuk pemerintah (Hasibuan, 2023). Sementara itu menurut Tisniwati (2012) menjelaskan bahwa banyak faktor di negara-negara berkembang berkontribusi pada tingkat kemiskinan yang tidak merata karena perbedaan populasi, negara yang dijajah, tingkat pendapatan, sumber daya manusia, aset, dan ketergantungan ekonomi dan kekuatan politik di negara-negara lain.

Di antara ribuan pulau Indonesia, terdapat enam pulau utama yaitu Maluku dan Papua, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan yang memegang peranan penting dalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya bangsa. Meskipun setiap pulau memiliki kekayaan alam dan potensi pembangunan yang besar, tingkat kemiskinan yang terjadi di masing-masing wilayah menunjukkan ketimpangan yang lumayan signifikan. Perbedaan dalam hal akses pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan lapangan pekerjaan menjadi penyebab utama yang terus memperlebar jurang kesejahteraan antardaerah. Menurut kata data tahun 2024, Pulau Maluku dan Papua mencatat tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 19,39%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau lain. Lalu di urutan kedua yaitu Bali dan Nusa

Tenggara dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,27% meskipun terkenal dengan pariwisata yang maju, wilayah ini masih memiliki kemiskinan yang signifikan salah satu penyebabnya yaitu ketimpangan pendapatan. Selanjutnya pulau Sulawesi sebesar 9,59% dan diikuti oleh pulau Sumatera dengan tingkat kemiskinan 8,97%. Meskipun bukan yang tertinggi, angka kemiskinan di Jawa sebesar 8,48% tetap mengkhawatirkan sebagai pusat ekonomi, industri dan pemerintahan Indonesia, Jawa seharusnya memiliki tingkat kemiskinan yang paling rendah. Salah satu penyebabnya yaitu Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia, dengan populasi yang sangat besar. Hal ini menciptakan persaingan ketat diberbagai sektor dari mulai lapangan kerja, sumber daya alam, hingga kebutuhan dasar seperti perumahan, air bersih dan ketimpangan pendapatan yang masih tinggi. Sementara itu, Pulau Kalimantan menunjukkan angka kemiskinan terendah, yaitu 5,44% ini mencerminkan kondisi ekonomi yang relatif lebih stabil serta potensi sumber daya alam yang besar dan akses pembangunan yang lebih merata. Perbandingan ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang masih menjadi tantangan besar dalam pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

Pulau Jawa, sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan di Indonesia, kerap dianggap sebagai wilayah yang paling maju. Namun, kemajuan tersebut tidak serta-merta menghapuskan persoalan kemiskinan. Meskipun tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tercatat sebesar 8,48%, yang relatif lebih rendah dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia, angka ini tetap mempresentasikan jutaan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Ketimpangan antarwilayah di dalam Pulau Jawa sendiri, menjadi tantangan serius dalam upaya pengentasan

kemiskinan secara berkelanjutan. Berikut gambar yang menunjukkan data tingkat kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa tahun 2020-2024.



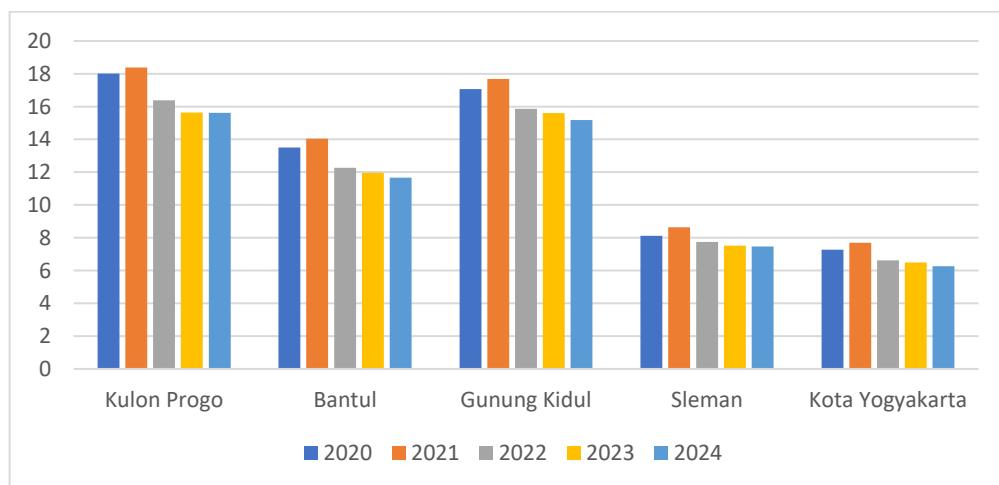
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Pulau Jawa menunjukkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih cukup signifikan. Provinsi D.I Yogyakarta menduduki peringkat pertama sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, yaitu dengan rata-rata sebesar 11,57%. Meskipun dikenal sebagai kota pelajar dan pusat kebudayaan, tingginya angka ini dipengaruhi oleh dominasi sektor informal, rendahnya upah pekerja, serta ketimpangan pendapatan. Sementara itu, Jawa Timur dan Jawa Tengah juga mencatat angka yang cukup tinggi, dengan rata-rata sebesar 10,55% dan 10,89%, berbeda dengan ketiga provinsi tersebut, Jawa Barat memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dengan rata-rata yakni 7,80% lalu disusul oleh Banten mencatat rata-rata angka 6,12%, sementara DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Pulau Jawa yaitu hanya 4,50%.

Data tersebut menunjukkan adanya tantangan serius yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Salah satu penyebabnya yaitu pandemi Covid yang memiliki dampak terhadap ekonomi yang luar biasa, terutama di wilayah khusus Yogyakarta. Banyak Perusahaan di D.I Yogyakarta terpaksa melakukan PHK massal karena peraturan pemerintah untuk *lockdown* sehingga pendapatan perusahaan menurun. Maka dari itu tingginya tingkat pengangguran menyebabkan meningkatnya tekanan pada tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta.

Tingginya angka kemiskinan tersebut merupakan gabungan dari lima kabupaten/kota yang ada di D.I Yogyakarta, sangat penting untuk mengidentifikasi variabel yang dapat mempengaruhi angka kemiskinan di masing-masing daerah. Berikut gambar yang menunjukkan data tingkat kemiskinan Kab/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2020-2024.

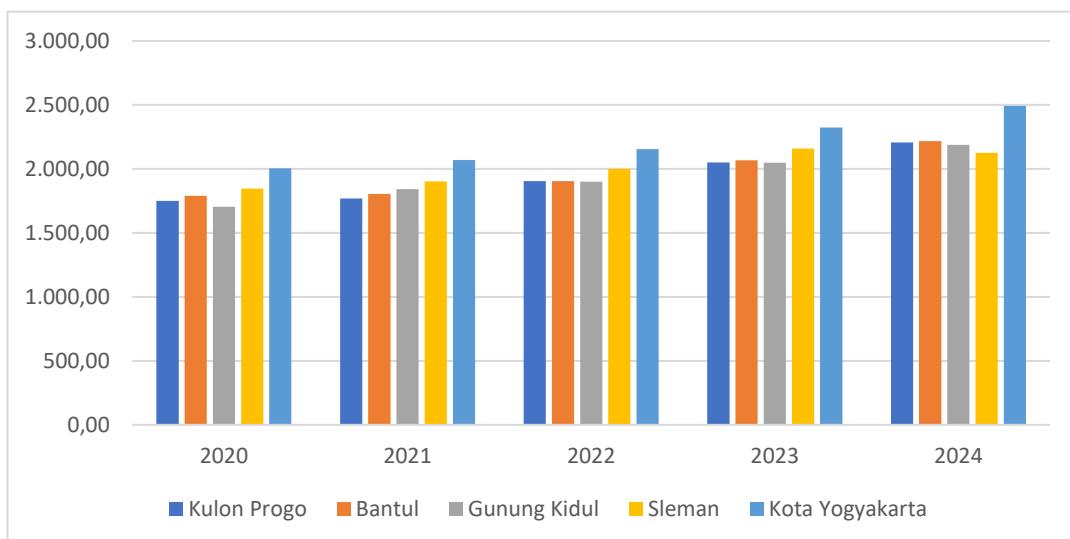


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2020-2024 (Persen)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa perbedaan tingkat kemiskinan yang mencolok antar kabupaten/kota di Provinsi D.I Yogyakarta berkaitan dengan distribusi hasil pertumbuhan yang tidak merata antar wilayah. Selain itu, dapat disebabkan karena standar minimum kebutuhan hidup antar satu daerah dengan daerah lain berbeda,.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan adalah kurangnya pendapatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Semakin tinggi penghasilan maka akan semakin mudah bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, begitupun sebaliknya. Pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai tingkatan upah yang disebut dengan upah minimum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Berikut tabel yang menunjukkan data upah minimum Kab/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2020-2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.3 Upah Minimum Kab/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta

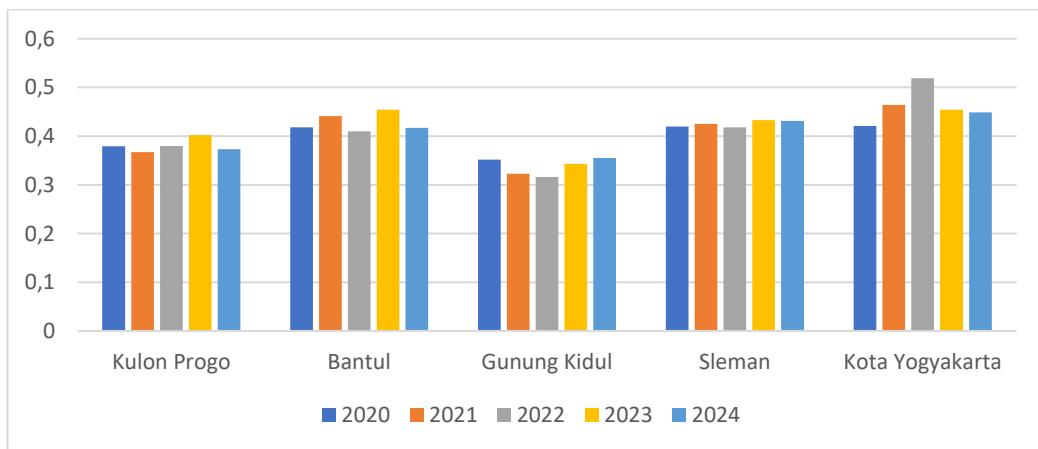
Tahun 2020-2024 (Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.3 terlihat bahwa setiap tahunnya upah minimum kab/kota di Provinsi Yogyakarta mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir. Adanya peningkatan upah minimum tersebut diharapkan masyarakat mampu mencukupi kehidupan pokoknya. Karena upah yang rendah mengakibatkan angkatan kerja tidak tertarik untuk melamar pekerjaan, hal tersebut dapat mendorong terjadinya penambahan angka pengangguran yang ada.

Penelitian Alifah & Imaningsih (2023) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil serupa juga ditemukan oleh Fajriansyah & Chandriyati (2022), Permatasari (2024) serta Putri & Fatimah (2024). Sebaliknya, penelitian Riyandini (2024), Sihotang & Hermanto (2025) dan Wulandari et al., (2025) menunjukkan upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, Rizaldi et al., (2024) menyimpulkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta menjadi fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, struktural, dan sosial. Oleh sebab itu, untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dalam mengatasi ketimpangan kemiskinan maka memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan disuatu daerah termasuk penting. Indikator yang harus dalam konteks D.I Yogyakarta yaitu tingkat pendapatan sebab mencerminkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam tingkat kemiskinan biasanya peningkatan pendapatan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan. Namun, distribusi pendapatan yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan kemiskinan sehingga penting untuk

menganalisis sejauh mana tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kemiskinan di Yogyakarta. Berikut gambar yang menunjukan data ketimpangan pendapatan Kab/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2020-2024



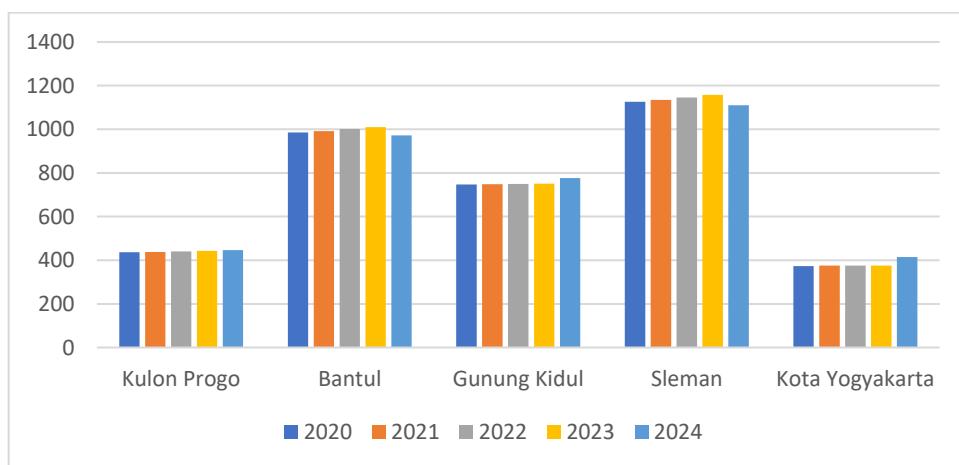
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.4 Ketimpangan Pendapatan Kab/Kota di Provinsi Yogyakarta Tahun 2020-2024 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.4 terlihat bahwa gini ratio bersifat fluktuatif setiap tahunnya. Dapat dilihat terdapat wilayah yang memiliki angka gini rasio paling tinggi yaitu kota Yogyakarta dengan wilayah ketimpangan yang paling tinggi pada tahun 2022 sebesar 0,519. Sedangkan wilayah dengan ketimpangan terendah yaitu Kabupaten Gunung Kidul.

Penelitian Safitri & Susilo (2024) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, Oktaviani et al., (2022) dan Titania & Setyowati (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Berbeda dengan keduanya, Klarita et al. (2025) menyimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Apabila pertumbuhan penduduk semakin meningkat dan tidak diimbangi dengan peningkatan sumberdaya pangan dan kualitas penduduk maka akan meningkatkan kemiskinan. Berikut gambar yang menunjukkan data jumlah penduduk di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

**Gambar 1.5 Jumlah Penduduk Kab/Kota di Provinsi Yogyakarta
Tahun 2020-2024 (Jiwa)**

Dapat dilihat pada gambar 1.4 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, jumlah penduduk di wilayah tersebut cenderung stabil dari tahun ke tahun tanpa adanya lonjakan atau penurunan yang signifikan. Setiap kabupaten/kota menunjukkan tren yang relatif sama, dengan perbedaan jumlah penduduk yang konsisten antarwilayah. Kabupaten Sleman dan Bantul tampak memiliki jumlah penduduk lebih tinggi dibanding wilayah lainnya, sementara Kota Yogyakarta dan Kulonprogo cenderung memiliki jumlah penduduk lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi penduduk di Provinsi DIY bersifat tetap, dengan

perubahan jumlah penduduk yang berlangsung secara perlahan dan merata di seluruh kabupaten/kota.

Menurut peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Alma'ruf (2023), Loka & Purwanti (2022) serta Ristika et al., (2021) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, Ardina (2024) dan Permatasari (2024) menunjukkan bahwa jumlah penduduk justru berpengaruh negatif. Sementara itu, menurut Nabibah dan Nurul (2023), jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Suatu daerah sering dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan. Indikator lain yang juga dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan di D.I Yogyakarta adalah tingkat pengangguran. Pengangguran terbuka adalah persentase penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terjadi karena bertambahnya angkatan kerja, tetapi lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja. Berikut gambar yang menunjukkan data tingkat pengangguran terbuka kab/kota di Provinsi Yogyakarta tahun 2020-2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

**Gambar 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota di Provinsi
D.I Yogyakarta Tahun 2020-2024 (Persen)**

Berdasarkan gambar 1.5 menunjukkan adanya penurunan tingkat pengangguran di hampir semua wilayah dari tahun ke tahun. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan, meskipun dengan kecepatan yang berbeda di setiap daerah. Tetapi, terdapat variasi yang cukup mencolok antarwilayah. Beberapa kabupaten/kota konsisten menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif tinggi, sementara daerah lainnya mencatat angka yang lebih rendah dan stabil. Misalnya, Kota Yogyakarta memiliki tingkat pengangguran terbuka yang paling tinggi dibandingkan wilayah lain, sedangkan Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tingkat pengangguran yang cenderung rendah dan stabil.

Penelitian Alifah & Imaningsih (2023), Permatasari (2024) dan Ristika et al., (2021) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, menurut Ibrahim Hasballah (2021), TPT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, menurut Ardina (2024), Putri & Fatimah (2024), Riyandini (2024) dan Wulandari et al., (2025) menunjukkan hasil bahwa TPT berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan belum ada yang meneliti secara bersama-sama antara variabel upah minimum, ketimpangan pendapatan, jumlah penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di D.I Yogyakarta tahun 2016-2024, serta metode penelitian

yang menggunakan data panel. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Upah Minimum, Ketimpangan Pendapatan, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di D.I Yogyakarta Tahun 2016-2024”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum, Ketimpangan Pendapatan, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di D.I Yogyakarta Tahun 2016-2024?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum, Ketimpangan Pendapatan, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di D.I Yogyakarta Tahun 2016-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum, Ketimpangan Pendapatan, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di D.I Yogyakarta Tahun 2016-2024
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum, Ketimpangan Pendapatan, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di D.I Yogyakarta Tahun 2016-2024

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya kegiatan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian yang diperoleh dapat berguna bagi semua pihak, antara lain:

- 1. Bagi Peneliti**

Memberikan wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian terkait pengaruh Upah Minimum, Ketimpangan Pendapatan, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama terhadap Kemiskinan di D.I Yogyakarta Tahun 2016-2024.

- 2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Yogyakarta**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk pemerintah daerah agar senantiasa mempunyai Solusi terkait kemiskinan di D.I Yogyakarta terutama di daerah-daerah terpencil.

- 3. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran, bahan informasi, serta sumber data bagi akademisi lainnya sebagai penunjang kegiatan perkuliahan serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini yaitu di Provinsi D.I Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kab/Kota Provinsi D.I Yogyakarta.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2023/2024, dimulai sejak bulan September 2023 dengan dengan melakukan pengajuan judul kepada pihak program studi ekonomi pembangunan.

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian